

## SISTEM DESENTRALISASI: ANALISIS RELASI INTERGOVERNMENTAL ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI BONDOWOSO JAWA TIMUR PERSPEKTIF EKOLOGI PEMERINTAHAN

Susyliya Dwi Puspita<sup>1</sup>, Baktiawan Nusanto<sup>2</sup>

[susyliadwipuspita@gmail.com](mailto:susyliadwipuspita@gmail.com)<sup>1</sup>, [baktiawan.nusanto@unmuhjember.ac.id](mailto:baktiawan.nusanto@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji relasi intergovernmental antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dalam kerangka sistem desentralisasi yang dianalisis melalui perspektif ekologi pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan, tulisan ini berargumen bahwa kualitas hubungan antartingkat pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh ketentuan normatif undang-undang, melainkan juga oleh kapasitas adaptif organisme pemerintahan daerah dalam merespons dinamika lingkungan strategisnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola relasi vertikal antara pusat dan Bondowoso masih mengandung ketegangan struktural, khususnya dalam hal ketergantungan fiskal dan asimetri informasi. Meski demikian, sejumlah inovasi lokal seperti penguatan layanan satu atap dan pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah mengindikasikan adanya kapasitas ekologis yang tumbuh. Penguatan daya saing daerah mensyaratkan sinergi antara kebijakan berbasis ekologi pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM aparatur, dan komitmen kepala daerah dalam membangun jaringan intergovernmental yang produktif.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, Relasi Intergovernmental, Ekologi Pemerintahan, Daya Saing Daerah, Bondowoso.

### ABSTRACT

*This journal article examines the intergovernmental relationship between the central government and the Bondowoso Regency Government, East Java, within the framework of the decentralization system, analyzed through the perspective of the ecology of governance. Using a literature review and policy document analysis, this paper argues that the quality of intergovernmental relations is not solely determined by the normative provisions of laws, but also by the adaptive capacity of local government organizations to respond to the dynamics of their strategic environment. The analysis reveals that the pattern of vertical relations between the central government and Bondowoso still contains structural tensions, particularly regarding fiscal dependence and information asymmetry. Nevertheless, several local innovations, such as the strengthening of one-stop services and the development of an economy based on local potential, indicate the emergence of growing ecological capacity. Strengthening regional competitiveness requires synergy between ecology-based governance policies, capacity building for government personnel, and the commitment of local leaders to building productive intergovernmental networks.*

**Keywords:** Decentralization, Intergovernmental Relations, Governance Ecology, Regional Competitiveness, Bondowoso.

### PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah secara mendasar arsitektur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Pembagian urusan pemerintahan yang diatur secara hirarkis mensyaratkan adanya relasi intergovernmental yang sinergis agar tujuan desentralisasi, yakni mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat daya saing daerah, dapat terwujud secara nyata.

Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang menarik untuk ditelaah dalam konteks ini. Sebagai kabupaten yang secara historis masih bergulat dengan persoalan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat, Bondowoso mewakili banyak daerah di Indonesia yang berada di posisi subordinat dalam relasi intergovernmental. Namun pada saat yang sama, kabupaten ini juga menunjukkan sejumlah terobosan kebijakan lokal yang mencerminkan kapasitas adaptif organisasi pemerintahannya.

Perspektif ekologi pemerintahan menawarkan lensa analisis yang relevan untuk memahami fenomena ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2019), ekologi pemerintahan memandang pemerintah sebagai organisme hidup yang tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dalam ekosistem yang dinamis. Setiap komponen dalam sistem pemerintahan saling berinteraksi secara timbal balik, dan efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem tersebut. Perspektif ini melampaui pendekatan legalistik-normatif yang hanya berfokus pada pembagian kewenangan formal.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pola relasi intergovernmental antara pemerintah pusat dan Kabupaten Bondowoso dalam kerangka desentralisasi, dengan menggunakan perspektif ekologi pemerintahan sebagai pisau analisis. Secara spesifik, artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana pola relasi vertikal antara pusat dan Bondowoso berlangsung dalam kerangka desentralisasi, dan sejauh mana ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk memahami kapasitas daya saing Bondowoso.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah kegiatan menghimpun dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, guna membangun landasan teoritis dan argumentasi yang kuat terhadap permasalahan yang dikaji (Mardalis, 1999; Sarwono, 2006). Metode ini dipilih karena tujuan artikel bukan untuk mengukur variabel secara empiris, melainkan untuk menganalisis dan menginterpretasikan fenomena relasi intergovernmental di Bondowoso dalam kerangka teori yang telah ada.

Sumber data dalam kajian ini bersifat sekunder, yang dikumpulkan dari tiga kategori utama. Pertama, literatur akademik berupa jurnal ilmiah, buku teks, dan prosiding yang membahas teori desentralisasi, relasi intergovernmental, ekologi pemerintahan, dan daya saing daerah. Kedua, dokumen kebijakan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen perencanaan seperti RPJMD Kabupaten Bondowoso. Ketiga, data statistik dan laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso, Kementerian Keuangan, dan lembaga pemeringkat daya saing nasional maupun internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara sistematis, baik secara luring melalui perpustakaan maupun secara daring melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan repositori institusional. Kriteria seleksi sumber mengutamakan relevansi topik, kredibilitas penulis atau lembaga penerbit, serta kemutakhiran publikasi, dengan prioritas pada karya yang terbit dalam rentang sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk karya-karya klasik yang bersifat foundational.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang bersifat iteratif. Pertama, reduksi data, yaitu proses menyaring dan memfokuskan informasi yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian dari keseluruhan bahan yang terkumpul. Kedua, penyajian dan

interpretasi data, yaitu mengorganisasikan temuan dari berbagai sumber ke dalam kerangka analisis yang koheren berdasarkan perspektif ekologi pemerintahan. Ketiga, penarikan simpulan, yaitu menyintesis temuan-temuan tersebut menjadi argumen yang menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Untuk menjaga kredibilitas analisis, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari literatur akademik, dokumen kebijakan, dan data statistik secara cross-check.

Keterbatasan metode ini perlu diakui secara jujur. Studi kepustakaan tidak menghasilkan data primer dari lapangan, sehingga analisis tentang Bondowoso sebagian besar bertumpu pada data sekunder yang bersifat agregat. Pengayaan kajian di masa mendatang sangat disarankan melalui penelitian lapangan berbasis wawancara mendalam dengan aparatur daerah, anggota DPRD, maupun tokoh masyarakat setempat agar dimensi-dimensi ekologis yang bersifat laten dan kontekstual dapat terkuak lebih detail.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ekologi Pemerintahan sebagai Kerangka Analisis**

Konsep ekologi pemerintahan berakar pada analogi organisme dalam ilmu biologi yang diaplikasikan ke dalam sistem pemerintahan. Kata "ekologi" sendiri berasal dari bahasa Yunani *oikos* (rumah) dan *logos* (ilmu), yang secara harfiah berarti ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup (Hasibuan, 2019). Dalam konteks pemerintahan, konsep ini merujuk pada kajian tentang hubungan timbal balik antara institusi pemerintah dengan lingkungan sosial, politik, dan alamnya.

Alexander Von Humboldt, sebagaimana dikutip Wulf (2015), adalah salah satu pemikir yang mengembangkan gagasan bahwa pemerintahan merupakan organisme hidup yang lahir, berkembang, dan bisa mengalami kemunduran. Dari perspektif ini, pemerintahan daerah tidak dapat dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar yang mencakup pemerintah pusat, lembaga legislatif daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lingkungan alam.

Dalam kerangka ekologi pemerintahan, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan regulasi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut menjaga keseimbangan ekosistem. Hasibuan (2019) menegaskan bahwa reaksi yang berlebihan dari kelompok sasaran kebijakan yang tidak diperhitungkan secara cermat dapat merusak sistem pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis kebijakan perlu mempertimbangkan seluruh komponen ekosistem, termasuk apa yang disebut sebagai "pemerintahan bayangan", yakni kekuatan-kekuatan informal yang turut memengaruhi arah kebijakan.

Relevansi kerangka ini untuk kajian desentralisasi terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa pola hubungan antara pusat dan daerah tidak selalu berjalan linear sesuai desain normatif. Faktor-faktor ekologis seperti kapasitas SDM aparatur, kekuatan kepemimpinan daerah, jaringan sosial-politik lokal, dan kekayaan sumber daya alam semuanya berperan dalam menentukan kualitas relasi intergovernmental.

### **2. Desentralisasi dan Relasi Intergovernmental: Perspektif Teoritis**

Teori desentralisasi dalam ilmu pemerintahan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Rondinelli et al. (1984) membedakan empat bentuk desentralisasi: dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Indonesia, dengan sistem otonomi daerahnya pasca-1999, secara dominan menerapkan model devolusi, di mana kewenangan substantif dialihkan kepada pemerintah daerah yang memiliki otoritas politik tersendiri.

Relasi intergovernmental (*intergovernmental relations/IGR*) merujuk pada totalitas interaksi, negosiasi, dan pertukaran sumber daya antartingkat pemerintahan (Wright, 1988). Berbeda dengan model hierarkis yang melihat relasi pusat-daerah sebagai perintah

dan kepatuhan, pendekatan IGR modern menekankan ketergantungan mutual (mutual dependency) dan negosiasi kontinual. Tiebout (1956) berargumen bahwa persaingan antardaerah dalam menarik investasi dan penduduk dapat mendorong efisiensi pelayanan publik, suatu gagasan yang relevan dengan konsep daya saing daerah.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tiga klasifikasi urusan pemerintahan: urusan absolut (sepenuhnya pusat), urusan konkuren (dibagi pusat-daerah), dan urusan umum. Pembagian ini secara formal menciptakan ruang bagi daerah untuk menjalankan otonominya. Namun, implementasinya di lapangan sering kali menemui hambatan struktural yang bersumber dari asimetri kapasitas dan ketergantungan fiskal (Pratikno, 2008).

### **3. Potret Bondowoso dalam Bingkai Desentralisasi**

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk sekitar 785 ribu jiwa dan luas wilayah 1.560 km persegi, Bondowoso adalah kabupaten yang sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dan perkebunan, dengan komoditas unggulan kopi arabika dan tape sebagai produk khas daerah (BPS Bondowoso, 2023).

Dari sisi fiskal, struktur keuangan daerah Bondowoso mencerminkan pola umum kabupaten-kabupaten di luar Jawa dan sebagian Jawa bagian timur, yakni tingginya ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD masih relatif kecil, sehingga ruang fiskal daerah untuk melakukan inovasi kebijakan cukup terbatas. Kondisi ini menciptakan relasi intergovernmental yang bersifat asimetris, di mana Bondowoso berada pada posisi dependen terhadap keputusan-keputusan anggaran yang dibuat di tingkat pusat.

Namun demikian, keterbatasan fiskal tidak selalu berarti ketiadaan inovasi. Beberapa inisiatif kebijakan di Bondowoso menunjukkan upaya nyata untuk mengoptimalkan potensi lokal. Program pengembangan kawasan agrowisata berbasis kopi di lereng Gunung Ijen-Raung, penguatan pasar tradisional, dan digitalisasi layanan administrasi kependudukan adalah contoh kebijakan yang mencerminkan respons adaptif terhadap tuntutan lingkungan. Dalam bahasa ekologi pemerintahan, ini adalah manifestasi dari kapasitas organisme pemerintahan daerah dalam menyesuaikan diri dengan ekosistemnya.

### **4. Analisis Relasi Intergovernmental: Antara Desain Normatif dan Realitas Ekologis**

Relasi antara pemerintah pusat dan Bondowoso dapat dianalisis dari tiga dimensi ekologis utama: dimensi kewenangan, dimensi fiskal, dan dimensi kapasitas kelembagaan.

Pertama, dimensi kewenangan. Secara formal, UU 23/2014 telah memetakan pembagian urusan secara cukup rinci. Namun dalam praktiknya, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sering kali belum ditetapkan tepat waktu, sehingga pemerintah daerah seperti Bondowoso mengalami kekosongan panduan dalam pelaksanaan urusan konkuren. Ini adalah contoh gangguan ekologis (ecological disturbance) dalam sistem pemerintahan: ketika salah satu komponen ekosistem tidak berfungsi optimal, komponen lain ikut terganggu.

Kedua, dimensi fiskal. Ketergantungan Bondowoso pada transfer pusat menciptakan pola relasi yang Wright (1988) sebut sebagai "picket fence federalism" dalam versi sentralistiknya, di mana hubungan pusat-daerah lebih bersifat vertikal-sektoral ketimbang horizontal-integratif. Kondisi ini diperparah oleh adanya earmarking dana transfer yang membatasi fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan lokal yang spesifik. Dari sudut pandang ekologi pemerintahan, kondisi ini analog dengan organisme

yang bergantung pada pasokan nutrisi dari luar dan karenanya memiliki daya adaptasi yang terbatas.

Ketiga, dimensi kapasitas kelembagaan. Kapasitas aparatur pemerintahan daerah merupakan faktor ekologis yang paling menentukan kualitas relasi intergovernmental. Hasibuan (2019) menekankan bahwa peningkatan daya saing daerah berjalan seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik. Di Bondowoso, tantangan ini diwujudkan dalam upaya penguatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), peningkatan kompetensi pejabat perencana, dan adopsi sistem informasi pemerintahan daerah.

### **5. Inovasi Lokal sebagai Ekspresi Kapasitas Ekologis**

Meski menghadapi berbagai keterbatasan struktural, Bondowoso menunjukkan beberapa contoh inovasi yang layak dijadikan bahan kajian. Pertama, pengembangan Kawasan Agrowisata Bondowoso yang mengintegrasikan sektor pertanian kopi arabika dengan pariwisata alam. Kebijakan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membaca potensi ekologis wilayahnya dan mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif. Dalam terminologi ekologi pemerintahan, ini adalah contoh bagaimana organisme memanfaatkan sumber daya ekosistemnya secara optimal.

Kedua, program Bondowoso Republik Kopi yang memposisikan Bondowoso sebagai daerah penghasil kopi arabika berkualitas tinggi di pasar nasional bahkan internasional. Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi petani, tetapi juga memperkuat identitas dan branding daerah, yang merupakan elemen penting dalam daya saing antardaerah. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, lintas tingkatan pemerintahan, dan kemitraan dengan sektor swasta, yang semuanya merupakan manifestasi dari relasi intergovernmental yang produktif.

Ketiga, upaya digitalisasi layanan administrasi melalui sistem pelayanan online terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah tanpa harus hadir secara fisik. Inovasi ini sejalan dengan amanat Pasal 386-389 UU 23/2014 tentang Inovasi Daerah dan menunjukkan bahwa Bondowoso mulai mengadopsi paradigma pemerintahan berbasis pengetahuan sebagaimana yang dianjurkan oleh perspektif ekologi pemerintahan.

Dalam sudut pandang yang lebih luas, proses digitalisasi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai dengan konsisten menerapkan paradigma pemerintahan yang berbasis pengetahuan. Jika dianalisis menggunakan pendekatan ekologi pemerintahan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini berperan sebagai alat metabolisme organisasi yang penting. Keberadaan sistem digital ini berhasil mengurangi hambatan birokrasi, menekan biaya transaksi, dan mempercepat pertukaran data di dalam organisasi.

Tabel 1 Dimensi Daya Saing Daerah dan Relevansinya bagi Bondowoso

| <b>Dimensi</b>          | <b>Indikator Daya Saing Daerah</b>              | <b>Relevansi bagi Bondowoso</b>           |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Institusi & Tata Kelola | Kualitas birokrasi, transparansi, akuntabilitas | Reformasi birokrasi DPMPTSP, e-Government |
| SDM & Kapasitas         | Kompetensi aparatur, inovasi pelayanan          | Pelatihan ASN, Diklat Kepemimpinan        |
| Infrastruktur & SDA     | Aksesibilitas, potensi alam daerah              | Pertanian, pariwisata alam Bondowoso      |
| Inovasi &               | Penerapan IPTEK dalam layanan                   | Smart village, digitalisasi               |

| Dimensi              | Indikator Daya Saing Daerah      | Relevansi bagi Bondowoso              |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teknologi            | public                           | administrasi                          |
| Keterbukaan & Fiskal | Kemandirian fiskal, DAU/DAK, PAD | Optimalisasi PAD, rasio fiskal daerah |

*Sumber: Adaptasi dari Bank Indonesia & Universitas Padjadjaran (2008) dan Dijkstra et al. (2018), diolah penulis.*

Tabel 1 di atas merangkum dimensi-dimensi utama daya saing daerah yang relevan bagi Bondowoso. Dari kelima dimensi tersebut, dimensi institusi dan tata kelola serta dimensi SDM dan kapasitas merupakan area prioritas yang paling langsung berkaitan dengan kualitas relasi intergovernmental. Sementara itu, dimensi infrastruktur dan SDA menjadi keunggulan komparatif yang perlu dioptimalkan melalui kebijakan yang tepat.

#### **6. Implikasi Ekologis: Menuju Relasi Intergovernmental yang Adaptif**

Dari analisis di atas, setidaknya terdapat tiga implikasi penting bagi penataan relasi intergovernmental di Bondowoso yang diinformasikan oleh perspektif ekologi pemerintahan.

Pertama, perlunya reorientasi dari model relasi hierarkis menuju model relasi kolaboratif. Dalam ekosistem pemerintahan yang sehat, hubungan antara pusat dan daerah seharusnya bersifat simbiosis mutualisme: pusat menyediakan NSPK, regulasi, dan dukungan kapasitas, sementara daerah memberikan umpan balik berupa data lapangan, inovasi lokal, dan implementasi kebijakan yang kontekstual. Kerangka kerja seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perlu direvitalisasi sebagai arena negosiasi intergovernmental yang substantif.

Kedua, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD. Ketergantungan fiskal yang tinggi melemahkan posisi tawar daerah dalam relasi intergovernmental dan membatasi ruang ekologis untuk melakukan inovasi kebijakan. Bondowoso perlu mengembangkan strategi fiskal yang lebih agresif dalam mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, serta mengembangkan kemitraan dengan BUMD untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Ketiga, investasi berkelanjutan dalam pengembangan SDM aparatur. Sebagaimana ditegaskan Hasibuan (2019) mengacu pada Farazmand (2004), aparatur yang berkualitas harus menguasai manajemen pengetahuan, teknologi informasi, fleksibilitas proses, orientasi klien, dan kemampuan negosiasi. Dalam ekosistem pemerintahan, SDM yang kompeten adalah faktor produksi ekologis yang paling strategis karena berfungsi sebagai katalis bagi seluruh komponen ekosistem lainnya.

### **KESIMPULAN**

Kajian mengenai relasi intergovernmental antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam kerangka desentralisasi mengukuhkan argumen bahwa efektivitas otonomi daerah tidak sekadar ditentukan oleh tatanan legal-normatif, melainkan oleh kapasitas adaptif ekologis dari organisme pemerintahan itu sendiri. Analisis melalui lensa ekologi pemerintahan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan mandat pembagian urusan yang jelas, realitas di lapangan masih menyisakan ketegangan struktural berupa asimetri informasi, keterlambatan penetapan NSPK oleh pusat, dan ketergantungan fiskal yang akut terhadap dana transfer (DAU/DAK). Kondisi ini menempatkan Bondowoso dalam posisi dependen dalam ekosistem pemerintahan nasional. Namun demikian, keterbatasan ruang fiskal tersebut mampu dieliminasi oleh tumbuhnya kapasitas ekologis daerah melalui berbagai

respons adaptif. Keberhasilan sejumlah inovasi lokal, seperti program Bondowoso Republik Kopi, integrasi agrowisata berbasis komoditas lokal di lereng Gunung Ijen-Raung, serta digitalisasi pelayanan publik, membuktikan bahwa komitmen kepemimpinan dan tata kelola berbasis pengetahuan (*knowledge-based governance*) mampu mengompensasi kelemahan struktural guna mendorong daya saing daerah. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoretis bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem pemerintahan yang mampu mentransformasikan keunggulan komparatif alam menjadi keunggulan kompetitif daerah.

Sebagai rekomendasi praktis, akselerasi daya saing Kabupaten Bondowoso ke depan mensyaratkan adanya reorientasi hubungan intergovernmental dari model hierarkis-sentralistik menuju pola kolaboratif yang berbasis simbiosis mutualisme. Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu secara konsisten memperkuat investasi pada kualitas SDM aparatur yang fleksibel dan responsif, sekaligus melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi PAD untuk mereduksi ketergantungan fiskal. Di sisi lain, pemerintah pusat dituntut untuk mereformasi kebijakan transfer fiskal dengan mengurangi skema earmarking agar memberikan ruang ekologis yang lebih leluasa bagi daerah dalam merespons kebutuhan lokal yang bersifat spesifik. Kajian ini memiliki keterbatasan karena ketergantungannya pada data sekunder, sehingga agenda penelitian mendatang perlu diarahkan pada studi lapangan yang mendalam untuk menguak dimensi ekologis informal dan kekuatan laten lainnya dalam dinamika pemerintahan lokal di Bondowoso.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. (2023). Bondowoso dalam Angka 2023. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso.
- Baker, S. dan Eckerberg, K. (2013). A policy analysis perspective on ecological restoration. *Ecology and Society*, 18(2): 17. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-05476-180217>.
- Dijkstra, L., Annoni, P., dan Kozovska, K. (2018). A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings. European Commission Working Papers.
- Farazmand, A. (2004). Sound Governance: Policy and Administrative Innovations. Westport, CT: Praeger Publishers.
- Hasibuan, A.S. (2019). Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan FPP IPDN*, 2(1): 33-47.
- Keraf, S.A. (2002). Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Pratikno. (2008). Governance dan Ketidakpastian: Menata Ulang Relasi Pusat-Daerah. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia dan LP3E Universitas Padjadjaran. (2008). Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Kota di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rondinelli, D.A., Nellis, J.R., dan Cheema, G.S. (1984). Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience. World Bank Staff Working Papers No. 581. Washington D.C.: World Bank.
- Schwab, K. dan Sala-i-Martin, X. (Eds.). (2018). The Global Competitiveness Report 2017-2018. Geneva: World Economic Forum.
- Tiebout, C.M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5): 416-424.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014.
- Wright, D.S. (1988). Understanding Intergovernmental Relations (3rd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing.
- Wulf, A. (2015). The Invention of Nature: Alexander von Humboldt's New World. New York: Alfred A. Knopf.